

ABSTRAK

Sebelum membuat laporan keuangan fiskal, setiap perusahaan pada umumnya harus memiliki laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan Peraturan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia. Selain itu, laporan keuangan komersial juga bertujuan untuk analisa koreksi fiskal sebagai dasar perhitungan pajak terhutang oleh perusahaan, yang dapat dilihat dari laporan laba rugi perusahaan. Salah satunya adalah PT. Bakti Mandiri perkasa yang merupakan badan usaha yang telah menyusun pembukuan sesuai dengan Peraturan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia dan merupakan wajib pajak di KPP Pratama Wonocolo Surabaya. Akan tetapi, PT. Bakti Mandiri Perkasa mendapat Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari KPP bahwa dalam SPT PPh Tahun 2018 terdapat biaya PPh 21, biaya cadangan kerugian piutang, biaya atas selisih PPh 22 dan 23, biaya BPJS Kesehatan dan biaya BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dapat dijadikan pengurang dalam laporan laba rugi. Sehingga terjadi kesalahan perhitungan beban pajak pada SPT Penghasilan (PPh) tahun 2018.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan yang Terhutang pada PT Bakti Mandiri Perkasa Tahun 2018. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari interview kepada manager keuangan dan data yang diperoleh dari staff akuntansi dan pajak. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan penelitian. Untuk validasi data dalam penelitian ini menggunakan uji credibility dengan teknik triangulasi dan

membercheck. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesalahan koreksi fiskal PT Bakti Mandiri Perkasa terhadap laporan keuangan komersial yang tidak sesuai dengan prinsip taxability deductibility maka dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan laba fiskal yang diperoleh perusahaan. menurut peneliti laba fiskal PT. Bakti Mandiri Perkasa tahun 2018 sebesar Rp. 6.197.798.543,00. Dengan adanya perubahan laba fiskal tahun 2018 maka seharusnya pajak penghasilan yang terhutang SPT Tahunan PT. Bakti Mandiri Perkasa tahun 2018 sebesar Rp. 859.090.414,-. Sehingga terdapat selisih kurang bayar PPh Pasal 29 sebesar Rp. 199.123.636,-.

Kata kunci:*laporan keuangan komersial, koreksi fiskal, pajak penghasilan yang terhutang*

ABSTRACT

Before making fiscal financial reports, every company generally must have financial reports that are prepared based on the Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK) regulations. In addition, commercial financial reports also aim to analyze fiscal as the basis for calculating taxes payable by the company, which can be seen from the income statement. One of them is PT. Bakti Mandiri Perkasa which is a business entity that has compiled bookkeeping in accordance with the Financial Accounting Standard Regulations (PSAK) in effect in Indonesia and is a taxpayer at KPP Pratama Wonocolo Surabaya. However, PT. Bakti Mandiri Perkasa received a Request for Explanation of Data and / or Information (SP2DK) from the KPP that in the 2018 SPT PPh there were PPh 21 fees, receivable loss reserves costs, costs for the difference between PPh 22 and 23, BPJS Health fees and BPJS Employment fees cannot be used as a deduction in the income statement. So that there was an error in calculating the tax burden on the 2018 Income Tax Return (PPh).

The purpose of this study is for Fiscal Correction of Income Taxes Payable at PT Bakti Mandiri Perkasa in 2018. The data collection techniques in this study were obtained from interviews with financial managers and data obtained from accounting and tax staff. The data analysis technique in this study is to reduce data, present data and attract research. To validate the data in this study, a credibility test was used with triangulation and member check techniques. The results of this study indicate that the error in the fiscal correction of PT Bakti Mandiri Perkasa in commercial financial statements that are not in accordance with the principle of tax deduction, it can be ignored that there is a change in the company's fiscal profit. according to researchers the fiscal profit of PT. Bakti

Mandiri Perkasa in 2018 amounting to Rp. 6,197,798,543.00. With the fiscal changes in 2018, the stage tax payable must be due to the Annual Tax Return of PT. Bakti Mandiri Perkasa in 2018 amounting to Rp. 859,090,414, -. So that there is a difference between underpayment of Income Tax Article 29 of Rp. 199,123,636, -.

Key words:*financial commercial report, fiscal correction, payable stage*